



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Senin, 25 Agustus 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



Subandi Sidak RTLH dan Bedah Warung di Porong-Kremlung

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Subandi, kembali melakukan inspeksi mendadak rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini sidak dilakukan di dua desa di Porong dan Kremlung, Sidoarjo, Sabtu (23/8/25).

Tahun ini, Pemkab Sidoarjo memang target melakukan pembinaan terhadap 164 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sidoarjo. Setiap rumah mendapat bantuan perbaikan senilai Rp30 juta.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Subandi kepada Slamet Widodo (73) warga Desa Porong, Kecamatan Porong dan Wahyudi (50) warga Desa Kremlung, Kecamatan Kremlung Sabtu siang (23/8/25).

Hadir pula dalam acara itu, Dandim 0816, Letkol Inf. Dedy Wahyu Widodo, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PCKTR) Sidoarjo, Bachrinni Arianan, Ketua BAZNAS Sidoarjo, M. Chasbi Aziz Salju Sodar, Camat Po-

jajaran.

"Pemkab Sidoarjo menyelurkan bantuan RTLH tahun ini sebanyak 164 rumah. Kami ingin masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman. Untuk itu kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar program ini terus berjalan optimal," ujar Subandi.

Dikatakan Subandi, program RTLH ini bukan hanya digagas Pemkab Sidoarjo saja, namun juga dari Dandim 0816 dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Sidoarjo.

"Kalau bantuan RTLH dari Dandim ini sebanyak 158, sedangkan BAZNAS sebanyak 20 hingga 25 rumah per bulan," jelasnya.

Slamet Widodo, penerima bantuan RTLH di Porong, menyampaikan rasa terima kasihnya. "Alhamdulillah, rumah saya akhirnya bisa diperbaiki. Saya sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pemkab Sidoarjo yang sudah peduli kepada kami," ujarnya.

Terpisah hal senada juga disampaikan Isti Wahyudi, warga Kremlung. "Terimakasih, matur nuwun bantuannya," ucapnya sambil menenggak haur.

Di sela kegiatan RTLH di Porong, Bupati Subandi juga melakukan inspeksi mendadak pada program bedah warung yang sudah berjalan di desa. Ia meninjau Warung Bu Leny yang kini berdiri dan beroperasi dengan baik. Program ini digagas Pemkab Sidoarjo untuk mendorong perekonomian masyarakat desa agar lebih maju dan berdaya.

"Bedah warung ini bukan sekedar membangun fisik, tapi juga membangkitkan ekonomi keluarga. Dengan adanya warung seperti Bu Leny, diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan," tegas Subandi.

"Kami akan terus melanjutkan program-program pro rakyat seperti RTLH dan bedah warung, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh pe-

Bupati Sidoarjo Pimpin Apel Akbar 3.843 Pegawai Non-ASN yang Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu



Breaking News

BUPATI SIDOARJO PIMPIN APEL AKBAR 3.843 PEKAWAI NON-ASN YANG DIANGKAT JADI PPPK PARUH WAKTU

Www.seputarindonesiatv.id

PKK dan Pokja PAUD Sidoarjo Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Usaha Berbasis Teknologi Informasi



Atap SDN Pesawahan Porong Terlalu Rendah, Komisi D Minta Diknas Beri Perhatian Khusus

SIDOARJO (liputansidoarjo.com) - Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H. Damroni Chudlori bersama H. Sutadji anegara Komisi D dari Fraksi PKB, melakukan inspeksi di SDN Pesawahan Kecamatan Porong, Jum'at (22/8/2025) pagi.



Inspeksi dilakukan oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H. Damroni Chudlori bersama H. Sutadji anegara Komisi D dari Fraksi PKB, di SDN Pesawahan Kecamatan Porong, Jum'at (22/8/2025) pagi.



Inspeksi dilakukan oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H. Damroni Chudlori bersama H. Sutadji anegara Komisi D dari Fraksi PKB, di SDN Pesawahan Kecamatan Porong, Jum'at (22/8/2025) pagi.

Semua Kabel di Alun-Alun Dipindah ke Bawah Tanah

* PROGRES revitalisasi Alun-alun Sidoarjo kini telah mencapai 20-30 persen. Pekerjaan yang dimulai sekitar satu setengah bulan lalu itu ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Hery Santoso, menjelaskan bahwa perkembangan proyek dapat dipantau melalui aplikasi e-kenda (elektronik kendali daerah).

Ke Halaman 10

TP PKK dan Pokja PAUD



Sosialisasi pengelolaan ekonomi keluarga dan usaha berbasis teknologi informasi di era digitalisasi

Sosialisasi Ekonomi Keluarga di Era Digital

SIDOARJO - TP PKK Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Pokja PAUD Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Usaha Berbasis Teknologi Informasi serta Talkshow Bunda PAUD di Pendopo Delta Wibawa, Jumat sore (22/8/25).

Kegiatan ini mengusung tema "Penjaga Awal Masa Depan Bangsa, Mengawal Setiap Langkah Kecil Menuju Generasi Emas Indonesia."

Hadir sebagai narasumber Talkshow Bunda PAUD, dr. Sriatun Subandi, yang menegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia unggul. Pada usia 0-6 tahun, anak berada dalam masa keemasan (golden age) di mana perkembangan otak dan karakter berlangsung pesat. Pendidikan berkualitas pada masa ini diyakini mampu mengoptimalkan potensi anak, baik kognitif, sosial, emosional, maupun spiritual.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya kader dan tokoh masyarakat, untuk menerapkan konsep 'PAUD dulu sebelum TK,'" ujarnya.

Dengan ajakan tersebut diharapkan angka partisipasi anak usia dini di lembaga PAUD semakin meningkat, keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar semakin kuat, serta terwujud layanan PAUD yang ramah anak, aman, inklusif, dan didukung lintas sektor.

Sebagai figur penggerak di tingkat daerah, Bunda PAUD bukan hanya simbol, tetapi juga agen perubahan yang menjembatani komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. "Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga menjadi gerakan bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar," tambahnya.

Selain dr. Sriatun Subandi, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirta Adi, sebagai narasumber talkshow. • Loe

Serapan Pupuk Subsidi Cukup Baik, Stok Aman hingga Akhir Tahun



LANHAN HLUAI: Produktivitas lahan pertanian di Sidoarjo tetap terjaga berkat dukungan pupuk subsidi.

Pemkab Gelontorkan Rp 10,8 Miliar untuk Tambah 400 Pju



Atap SDN Pesawahan Porong Terlalu Rendah, Komisi D Minta Diknas Beri Perhatian Khusus

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-

Ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Damroni Chudlori bersama H.Sutadii anggota komisi D dari Fraksi PKB, melakukan inspeksi di SDN Pesawahan Kecamatan Porong, Jum'at (22/8/2025) pagi.



Sidak ini berkenaan dengan kondisi gedung sekolahan SDN Pesawahan, yang atapnya terbilang cukup rendah, hanya setinggi 2 meter.

Bahkan untuk masuk ke teras ruang kelas, kedua wakil rakyat ini masih harus merunduk, karena sosoran atap paling depan lebih rendah lagi sekitar 1.7 meter.

"Atap sekolahan cukup rendah untuk ukuran sekolah dasar saat ini, memang seharusnya sudah ada peninggian atap di SDN pesawahan ini," ujar H.Sutadii saat di lokasi.

Saat berkeliling ke beberapa sudut sekolahan, kedua wakil rakyat ini didampingi langsung Nafidatul Ummah Spd kepala SDN Pesawahan.

Beberapa kali ketua komisi D berhenti sejenak, terlihat sedikit was-was melihat kabel listrik yang menjuntai cukup rendah di teras kelas.

"Ini membahayakan anak didik, karena kabel listriknya juga cukup rendah," jelas Damroni.

Liputan Sidoarjo.com

Dari pantauan di lapangan, sekolahan yang sudah berganti sekitar tujuh kepala sekolah ini, masih menggunakan kayu untuk penahan atapnya.

Meskipun terbuat dari kayu jati, namun karena usia sekolahan sudah hampir 50 tahunan ini, kelayakan sekolahan sudah mesti diganti.

“Saya baru setahun jadi kepala sekolah di SDN Pesawahan ini. Kondisi ruang kelas memang sudah seperti ini dari dulu, dan butuh peninggian atap,” terang Nafidatul kepala sekolah.

Untuk mempercepat pengajuan peninggian atap sekolah SDN Pesawahan ini, ketua komisi D bersama H. Sutadji langsung melakukan komunikasi dengan DR Tirta Adi Kadiknas Kabupaten Sidoarjo.

Alhasil, peninggian atap untuk sekolah ini, diusahakan pada tahun anggaran 2026 nanti oleh kadiknas. (Abidin)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Bupati Sidoarjo Pimpin Apel Akbar 3.843 Pegawai Non-ASN Sekaligus Kerja Bakti



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi memimpin langsung Apel Akbar Pengarahan terhadap 3.843 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lapangan Parkir Timur GOR Delta, Jumat (22/08/2025).

Apel akbar ini, menjadi momentum penting dalam komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian status tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Selain diikuti ribuan calon PPPK Paruh Waktu, apel ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin, Dandim 0816 Sidoarjo, deluruh kepala OPD dan jajaran Forkopimda Sidoarjo. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan sinergi antar lembaga dalam mensukseskan kebijakan pengangkatan tenaga kerja pemerintah yang adil dan berkelanjutan.



Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo serius memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan pemerintahan. Khususnya, tenaga non ASN yang

sudah mengabdikan selama bertahun-tahun. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non ASN yang gagal dalam seleksi PPPK sebelumnya.

"Kami tidak akan membiarkan mereka yang setia mengabdikan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Mereka tetap akan bekerja di instansi masing-masing dan harus berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas, amanah dan profesional kerja dalam melayani masyarakat," ujar Subandi di sela-sela Apel Akbar.

Bagi Subandi, sebanyak 3.843 tenaga non ASN yang termasuk dalam kategori R3 dan R4 serta telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) dari BKN yang mendorong pemerintah daerah mengangkat pegawai paruh waktu, dengan mempertimbangkan data yang telah masuk ke BKN dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta kemampuan anggaran daerah.

Namun, masih terdapat 2.311 tenaga non ASN yang belum masuk dalam kategori R3 dan R4. Terhadap sisa ribuan tenaga non ASN ini, Pemkab Sidoarjo berjanji akan mencari solusi alternatifnya. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pengalihan ke skema outsourcing sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang dikeluarkan BKN.

"Bagi 2.311 tenaga yang belum terdata di BKN, akan kita carikan solusi yang terbaik. Yakni kita akan arahkan ke outsourcing sehingga tidak ada PHK sama sekali di Pemkab Sidoarjo," janji Subandi.

Sementara Apel Akbar yang penuh semangat ini, dilanjutkan dengan kegiatan senam bersama dan kerja bakti bersama-sama di kawasan GOR Delta Sidoarjo.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat solidaritas dan menumbuhkan semangat gotong royong di antara para pegawai pemerintah daerah baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Subandi memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Termasuk, para tenaga Non-ASN Pemkab Sidoarjo yang dinyatakan tidak lolos tes penerimaan PPPK Pemkab Sidoarjo.

Warih Andono di Tengah Pertikaian Warga Mutiara Regency – City



Sidoarjo – cakrajatim.com: Warga Perumahan Mutiara Regency, Sidoarjo tetap bertahan untuk tidak membuka akses jalan bagi warga perumahan City. Jumat tadi, warga Mutiara Regency mengundang wakil ketua DPRD, Warih Andono. Namun tampaknya Warih tidak hadir karena sedang sakit.

Warga Perumahan Mutiara Regency, Santo, pertemuan dengan Warih Andono untuk mengetahui solusinya seperti apa. Karena dari pertemuan pertama dengan Warih di DPRD Sidoarjo, terkesan Warih menyetujui penggunaan akses jalan Perumahan untuk warga Mutiara City.

Dalam Perjanjian ketika dibangunnya Perumahan Mutiara Regency, menurut Santo, warga Mutiara City membangun akses sendiri melewati jalan desa ternyata dalam promosi penjualan Perumahan Mutiara City yang sudah dihuni 300 KK akses jalannya dilewatkan gerbang Mutiara Regency.

➡CakraJatim.com

"Ini yang kita masalahkan, kita tidak mau lingkungan Perumahan kita terganggu oleh lalu lintas kendaraan dari Perumahan lain," Ujarnya.

Kuasa hukum pengembang Mutiara City, Budi Santoso, menyatakan warga Mutiara City hanya punya akses jalan desa akibat jalan utama ke jalan raya di portal warga Perumahan Mutiara Regency.

"Kita tidak enak dengan warga desa Banjar Bendo yang jadi lalu lintas satu-satunya akibat di portalnya gerbang Mutiara Regency," ujar Budi. Dengan pemasangan portal artinya hanya penghuni Mutiara Regency saja yang diizinkan lewat.

Ia menegaskan, bahwa fasum jalan Perumahan itu sudah diserahkan ke Pemkab Sidoarjo. Dengan demikian fasum itu jadi milik publik. Sehingga ia mempertanyakan kenapa jalan umum itu di portal, tanyanya.

Kepala Desa Banjar Bendo, Sugeng Bahagia, membenarkan bahwa fasum Perumahan Mutiara Regency sudah diserahkan Pemkab Sidoarjo. Jalan itu sudah menjadi tanggung jawab Pemkab. Ia mengaku baru kali ini diundang warga Mutiara Regency untuk bertemu Warih Andono.

Budi Santoso, menambahkan pihaknya siap bertemu lagi dengan DPRD dan warga Perumahan yang bertikai soal jalan. Lebih baik lagi bila melibatkan aparat Pemkab Sidoarjo sebagai pemilik jalan. (hds)

Masyarakat Sidoarjo Terima Bansos Pemprov Jatim Senilai Rp 4,9 Miliar



Sidoarjo, Sinar Pos-Ribuan masyarakat Sidoarjo menerima beragam bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jatim dengan total nilai mencapai Rp 4.914.099.600. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Sidoarjo, Subandi, di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, Jumat (22/8/2025).

Bansos tersebut sebagian besar bersumber dari Dinas Sosial Jatim senilai Rp 3,968 miliar, disusul Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim sebesar Rp 920,5 juta, serta kontribusi dari BUMD Jatim senilai Rp 25 juta.

Beragam Bansos tersebut mencakup Bansos Program Keluarga Harapan Plus/PKH Plus, Bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas/ASPD, BLT Buruh Pabrik Rokok Lintas Wilayah, Bansos Kewirausahaan Inklusif dan Produktif (KIP) yang mencakup KIP Putri Jawara atau Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera, KIP KPM Jawara atau Keluarga Penerima Manfaat Jatim Sejahtera serta KIP PPKS Jawara atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jatim Sejahtera.

Selain itu terdapat bantuan Program Pemberdayaan BUMDes, Program Desa Berdaya serta Program Jatim Puspa dari Dinas PMD Jatim. Terdapat pula bantuan alat bantu mobilisasi Lansia dan penyandang disabilitas serta pemberian bantuan operasional dan taliasih bagi pilar-pilar sosial seperti SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TSKS dan Tagana dari Dinsos Jatim. Bantuan Zakat Produktif dari BUMD Jatim juga ikut diserahkan.

Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah mengatakan penyaluran Bansos kali ini sudah berada dititik lokasi ke-27 dari 38 kabupaten kota di Jatim. Disampaikannya program bantuan yang disalurkan tidak hanya bersifat charity.

Ada juga bantuan pemberdayaan seperti Bansos Kewirausahaan Inklusif dan Produktif atau KIP. Salah satunya diperuntukkan bagi perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ada juga zakat produktif untuk pelaku usaha mikro.

"Seperti PKL penjual gorengan, cendol, itu yang kita support untuk mendapatkan penguatan, harapannya adalah mereka terhindar dari rente (rentenir) atau Pinjol ilegal,"ucapnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh bantuan tersebut segera sampai kepada penerima manfaat. Lebih penting lagi harus tepat sasaran dan tidak digunakan bermain judi online.

"Saya pesan jangan dipakai untuk judi online, manfaatkan dengan baik untuk kebaikan keluarga, mudah-mudahan manfaat barokah,aamiin,"pesannya

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakatnya. Ia katakan pemberian bantuan tersebut merupakan wujud nyata perhatian pemerintah Provinsi Jatim kepada masyarakat Sidoarjo.

Ia berharap sinergi Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat terus diperkuat. Hal tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan sosial yang telah banyak membantu masyarakat rentan,"ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi juga menyatakan Kabupaten Sidoarjo siap mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Pemprov Jatim. Kebijakan dan arahan siap dilakukannya demi kemajuan bersama.

"Sidoarjo akan terus support mendukung program-program ibu gubernur,"ucapnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Pimpin Apel Akbar 3.843 Pegawai Non-ASN yang Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu



SeputarIndonesiatv.id || **KOMINFO, Sidoarjo** - Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memimpin langsung Apel Akbar Pengarahan terhadap 3.843 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lapangan Parkir Timur GOR Delta, Jumat (22/8/2025).

Apel akbar ini menjadi momentum penting dalam komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian status tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan daerah Sidoarjo.



Selain diikuti oleh ribuan calon PPPK paruh waktu, apel tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, anggota DPRD Sidoarjo Komisi A, Dandim 0816 Sidoarjo, Seluruh kepala OPD serta jajaran Forkopimda.

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan sinergi kuat antar lembaga dalam menyukseskan kebijakan pengangkatan tenaga kerja pemerintah yang adil dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, H.Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo serius memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan pemerintahan, khususnya tenaga non ASN yang telah mengabdikan bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa Pemkab tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non ASN yang gagal dalam seleksi PPPK sebelumnya.

"Kami tidak akan membiarkan mereka yang telah setia mengabdikan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Mereka tetap akan bekerja di instansi masing-masing dengan harus komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas, amanah dan profesional dalam melayani masyarakat," tegas H.Subandi.

Sebanyak 3.843 tenaga non ASN yang termasuk dalam kategori R3 dan R4 serta telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran dari BKN yang mendorong pemerintah daerah mengangkat pegawai paruh waktu, dengan mempertimbangkan data yang telah masuk ke BKN dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta kemampuan anggaran daerah.

Namun, masih terdapat 2.311 tenaga non ASN yang belum masuk dalam kategori R3 dan R4. Terhadap mereka, Pemkab Sidoarjo berjanji akan mencari solusi alternatif. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pengalihan ke skema outsourcing sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang dikeluarkan oleh BKN.

"Bagi 2.311 tenaga yang belum terdata di BKN akan kita carikan solusi yang terbaik, yaitu kita akan arahkan ke outsourcing sehingga tidak ada PHK", ujar Bupati H.Subandi.

Apel akbar yang penuh semangat ini dilanjutkan dengan kegiatan senam bersama dan kerja bakti di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat solidaritas dan menumbuhkan semangat gotong royong di antara para pegawai pemerintah daerah.

Rapat Koordinasi Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dispendikbud



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, –Rapat koordinasi Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dispendikbud. Polemik kelebihan siswa di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 akhirnya mendapat titik terang. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), Kamis (21/8/2025).

Rakor yang dipimpin Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori, berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo. Turut hadir Wakil Ketua Bangun Winarso, Sekretaris Zahlul Yussar, dan sejumlah anggota komisi lainnya.

Dari pihak Dispendikbud, hadir langsung Kepala Dinas Tirto Adi beserta para kepala sekolah yang terdampak, antara lain SDN Candipari 2, SDN Kesambi, SDN Sawotratap 2, SDN Kalinecabean, SDN Kebonagung 2, SDN Waru 2, SDN Sepanjang 1, SDN Keper, SDN Gedang 1, SDN Durung Banjar dan SDN Krian 04.

Salah satu kasus yang mencuat adalah di SDN Candi Pari 2, Porong, yang menerima 42 siswa, melebihi kuota maksimal 32 siswa. Setelah melalui proses klarifikasi, sebanyak 14 siswa dipindahkan ke sekolah terdekat dengan persetujuan wali murid. Hal serupa juga terjadi di SDN Kesambi.

Permasalahan Sistem dan Kurangnya Komunikasi

H. Dhamroni—menyebut permasalahan ini muncul akibat kesalahan sistem dan kurangnya pemahaman teknis dari pihak sekolah. Ia menegaskan pentingnya komunikasi antara sekolah, orang tua, dan Dispendikbud agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pendidikan adalah kebutuhan dasar. Permasalahan seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Kami mendorong penyelesaian secara cepat dan humanis, dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis anak-anak yang dipindah,” tegasnya.

Antisipasi dan Tambahan Rombel

Rapat koordinasi Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dispendikbud. Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, menambahkan bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran ke depan. Ia mendorong sekolah untuk lebih jeli membaca animo masyarakat, dan tidak ragu mengusulkan penambahan rombongan belajar (Rombel) jika diperlukan.

“Jika kepercayaan masyarakat tinggi, itu pertanda baik. Tapi harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah dalam akses pendidikan,” ujarnya.

Dispendikbud Akan Beri Sanksi

Kepala Dispendikbud Tirto Adi mengakui ada 11 sekolah yang melanggar ketentuan SPMB. Pihaknya telah menyelesaikan persoalan melalui pendekatan komunikatif dengan wali murid, dan akan memberikan sanksi berupa teguran lisan hingga peringatan tertulis kepada sekolah yang melanggar.

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Alhamdulillah semua bisa diselesaikan secara baik-baik,” tutup Tirto.

PKK dan Pokja PAUD Sidoarjo Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Usaha Berbasis Teknologi Informasi



Sidoarjo (republikjatim.com) - TP PKK Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Pokja PAUD Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Usaha Berbasis Teknologi Informasi serta Talkshow Bunda PAUD bertemakan Peniaga Awal Masa Depan Bangsa, Mengawal Setiap Langkah Kecil Menuju Generasi Emas Indonesia. Acara ini, diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (22/08/2025).

Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan Talk Show Bunda PAUD dr Sriatun Subandi. Menurut Sriatun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi pondasi penting dalam proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Pada masa usia dini, yaitu usia 0-6 tahun, anak berada dalam masa keemasan (golden age) di mana perkembangan otak dan karakter berlangsung sangat pesat. Jika pada masa ini anak mendapatkan stimulasi yang tepat, melalui pendidikan yang berkualitas, maka potensi anak dapat berkembang secara optimal, baik secara kognitif, sosial, emosional maupun spiritual.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk seluruh kader dan tokoh masyarakat untuk dapat mengajak dan menerapkan PAUD dulu sebelum TK," ujar Sriatun.

Dengan adanya ajakan PAUD ini diharapkan dapat meningkatnya angka partisipasi anak usia dini di lembaga PAUD. Bahkan, bisa meningkatnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar, terwujudnya layanan PAUD yang ramah anak, aman dan inklusif.

"Selain itu, meningkatnya kesadaran lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan anak bunda PAUD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tercapainya pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan holistik," kata Sriatun yang juga anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini.

Sebagai figur penggerak di tingkat daerah, bunda PAUD bukan hanya simbol. Akan tetapi, juga agen perubahan yang meniadakan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan.

"Mudah - mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi sebatas sosialisasi semata. Akan tetapi, juga menjadi gerakan ajakan untuk seluruh elemen PAUD dulu TK kemudian yang dimulai dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan sekitar," paparnya.



Selain dr Sriatun Subandi turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi sebagai narasumber talk show dalam kesempatan ini

Sementara pada sesi berikutnya dilanjutkan dengan Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Usaha Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan Miftahudin SE serta Irviani Yuditomo dari Diperindag Pemkab Sidoarjo sebagai narasumber.

Kegiatan ini bertujuan sebagai edukasi dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan usaha berbasis teknologi informasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Yakni melalui kader PKK Kecamatan maupun Desa. Selain itu, juga untuk memberikan wawasan pengetahuan terkait pengelolaan ekonomi keluarga dan usaha untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

"Kami berharap pada kegiatan ini bisa mengenai sasaran karena pada pengelolaan ekonomi keluarga dan usaha berbasis teknologi informasi ini disampaikan tentang pengelolaan ekonomi keluarga dan tempat usaha dalam menghadapi era digitalisasi," tandasnya. Ary/Waw

Anak SDN Sidoarjo Terkorbankan, DPRD dan Publik Desak Reformasi Pendidikan



Sidoarjo, Ruang.co.id – Puluhan murid SD di Kabupaten Sidoarjo merasakan dampak pahit SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), yang menyalahi batas pagu.

Banyak anak harus pindah sekolah, sedikitnya ada 24 siswa di dua SDN dan yang 2 siswa beserta orang tuanya menolak pindah sekolah. Padahal mereka sudah merasa nyaman.

DPRD Sidoarjo melalui Komisi D sebagian besar merespons dengan kecaman tajam, dan menyerukan reformasi sistem yang lebih manusiawi.

Hal itu melihat realitas yang menyakitkan bagi siswa dan orang tua siswa, hanya karena melebihi Pagu sekolah dari buruknya pengawasan Dispendikbud Sidoarjo.

Hasil monitoring Dispendikbud Sidoarjo menemukan 11 sekolah mengalami overquota, dengan total 48 siswa terdampak. SDN Candipari II memegang catatan tertinggi: 14 siswa kelebihan, diikuti SDN Kesambi dengan 12 siswa lebih.

Dispendikbud memastikan anak-anak itu dengan alibi tidak DO (drop out), meski anak – anak itu sempat dikeluarkan dari sekolah awal yang sudah sekitar dua minggu lebih mengikuti kegiatan belajar.

Tetapi dialihkan ke sekolah terdekat agar tetap tercatat di dapodik dan mendapat ijazah. Di Candipari II, separuh siswa dipindahkan ke SDN Candipari I, sisanya “dititipkan” administrasi agar bisa tetap belajar.

“Dari dinas pendidikan sudah memberikan arahan kepada para Kepala sekolah, untuk berkoordinasi dengan para siswa dan orang tuanya, untuk mengalihkan murid-murid dari

kelebihan Pagu itu, untuk ditempatkan di SD yang pagunya belum penuh, sehingga nanti para siswa dapat masuk dalam dapodik dan mendapatkan biaya operasional sekolah,” kilah Tirta Adi Kepala Dispendikbud, dalam acara hearing.

Kritik Tajam DPRD: Sistem Kaku dan Koordinasi Lemah

Dalam prolog dimulainya hearing, Komisi D DPRD mengecam lemahnya koordinasi Dispendikbud. Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori, menyebut overquota bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi kesalahan sistemik, serta lemah mengedepankan rasa kemanusiaan.

“Kalau SDN sampai penuh, artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri sudah kembali naik,” ujar Dhamroni.

“Kepala sekolah dan dinas seharusnya bisa memprediksi sejak awal. Anak-anak yang terdampak juga perlu didampingi orang tua agar kondisi psikologis mereka tetap nyaman”.

Kritikan juga datang dari Wakil Ketua Bangun Winarso, yang menilai Dispendikbud, “kurang koordinasi hingga muncul masalah ini yang ramai jadi pembicaraan publik”. Ini menunjukkan sistem yang dibiarkan berjalan tanpa kontrol memadai.

Orang Tua Terbelah: Antara Lega dan Luka Emosional

Anak-anak menangis saat sekolah lama mereka tiba-tiba menyatakan kelebihan kuota. Sekalipun pihak sekolah dan guru “membujuknya” dengan persuasif.

Belum lagi ongkos transportasi, seragam baru, atau biaya adaptasi di sekolah baru. Orang tua merasa sudah mengeluarkan biaya seragam dan perlengkapan, kok tiba-tiba disuruh pindah tanpa penjelasan logis dan manusiawi, begitu ungkap seorang wali murid frustrasi di lapangan.

Kepala sekolah juga mengaku, selalu ada laporan dan koordinasi dengan Dispendikbud saat pelaksanaan SPMB, sekalipun diantara mereka merasa takut untuk menunjukkan jatidiri.

Bangun Winarso, Wakil Ketua Komisi D menilai, Dispendikbud semestinya juga melakukan pendekatan demografis dan geografis untuk dilakukan analisa lapangan temuan perkembangan terbarunya.

“Bahkan semestinya menurut aturan SPMB dalam situasi dan kondisi tertentu, pihak sekolah boleh mengajukan tambahan rombel, melalui usulan ke Dispendikbud untuk di tandatangani dan disetujui Bupati maupun di lingkungan dinas pendidikan di tingkat provinsi Jawa Timur,” tandas Bangun Winarso.

Hal demikian dengan lemahnya atau tidak maksimal koordinasi dari Dispendikbud, menyebabkan tekanan administrasi terhadap sekolah, murid dan wali murid.

Dalam hearing, Kepala Dispendikbud Tirta Adi beralasan secara normatif dan mengakui transisi SPMB berbeda dengan PPDB, dengan sistem dapodik yang menutup pagu.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Targetkan Renovasi 164 RTLH Setahun, Bupati Janji Lanjutkan Program Beda Warung



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sidoarjo. Kali ini sidak dilakukan di dua desa di Kecamatan Porong dan Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Sabtu (23/08/2025).

Tahun ini, Pemkab Sidoarjo memasang target melakukan pembenahan terhadap 164 unit RTLH di Kabupaten Sidoarjo. Setiap rumah mendapat bantuan perbaikan senilai Rp 30 juta.

Bantuan itu, secara simbolis diserahkan Bupati Sidoarjo, Subandi kepada Slamet Widodo (73) warga Desa/Kecamatan Porong dan Wahyudi (50) warga Desa/Kecamatan Krembung.

Hadir pula dalam acara itu, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karva dan Tata Ruang (P2CKTR) Pemkab Sidoarjo Bachruni Aryawan, Ketua Baznas Sidoarjo M Chasbil Aziz Saldju Sodar, Camat Porong dan Camat Krembung beserta jajarannya.

"Pemkab Sidoarjo menyalurkan bantuan RTLH tahun ini sebanyak 164 unit rumah. Kami ingin masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, aman dan nyaman. Untuk itu, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar program ini terus berjalan optimal," ujar Subandi di lokasi sidak.



Menurut Subandi, Program RTLH ini bukan hanya ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo saja. Akan tetapi, juga ditopang dari Dandim 0816 dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidoarjo.

"Kalau bantuan RTLH dari Dandim ini sebanyak 158 unit. Sedangkan dari BAZNAS sebanyak 20 hingga 25 rumah perbulan," ungkap Subandi yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.

Sementara salah seorang penerima RTLH asal Desa Porong, Slamet Widodo mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan rehab rumahnya itu.

"Alhamdulillah, rumah saya akhirnya bisa diperbaiki. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan Pemkab Sidoarjo yang sudah peduli kepada kami warga yang kurang mampu ini," katanya.

Hal senada disampaikan Istri Wahyudi, Ny Rini warga asal Desa Krembung. "

"Terimakasih, matur nuwun atas bantuannya," ucapnya sambil menangis terharu.

Di sela-sela sidak RTLH di Porong, Subandi juga melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) program Bedah Warung yang sudah berjalan di desa itu. Ia meninjau Warung Bu Leny yang kini berdiri dan beroperasi dengan baik. Program ini, digagas Pemkab Sidoarjo untuk mendorong perekonomian masyarakat desa agar lebih maju dan berdaya.

"Program Bedah Warung ini bukan sekadar membangun fisik saja, akan tetapi juga membangkitkan ekonomi keluarga. Dengan adanya warung seperti Bu Leny ini, diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan," tandas Subandi.

|

Selain itu, Subandi berjanji bakal melanjutkan program Bedah Warung ini.

"Kami akan terus melanjutkan program-program pro rakyat seperti RTLH dan Bedah Warung ini. Karena bisa manfaat bagi masyarakat dan pembangunan dapat dirasakan langsung masyarakat di seluruh pelosok desa," pungkasnya. Ary/Waw

PBSI Sidoarjo Gelar Kejurkab, 435 Atlet Perebutkan Piala Bupati



Sidoarjo, Gema Nusantara – Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Bulutangkis 2025 kembali digelar oleh Pengkab PBSI Sidoarjo. Turnamen bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Sidoarjo ini berlangsung mulai Rabu (20/8) hingga Sabtu (23/8) di Stadion Bulutangkis Cemerlang, Kelurahan Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo.

Ada sebanyak 435 atlet dari 39 klub bulu tangkis di Kabupaten Sidoarjo yang meramaikannya. Atlet-atlet bulu tangkis yang bertanding mulai usia pra dini dari usia 9 tahun hingga kelas veteran.

Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, dalam sambutannya menilai ajang ini sangat penting sebagai bagian dari pembinaan atlet bulutangkis sejak dini. Menurutnya, turnamen semacam ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mencari bibit unggul.

“Kegiatan seperti ini bagus untuk pembibitan atlet, dari sini akan muncul atlet-atlet yang memiliki potensi untuk diproyeksikan pada kejuaraan yang lebih tinggi semisal dalam Porprov Jatim,” ucapnya.

Ia sendiri melihat antusiasme para atlet yang ikut dalam Kejurkab Bulu Tangkis kali ini. Menurutnya hal itu menjadi peluang munculnya atlet-atlet bulu tangkis baru di Sidoarjo. Dari event olahraga seperti ini ungkap Imam, juga dapat diketahui potensi atlet itu sendiri.



Imam Mukri juga mengatakan pembibitan atlet penting dilakukan. Bahkan sebisa mungkin dimulai sejak usia dini. Pasalnya mencetak atlet olahraga berprestasi tidak instan. Dibutuhkan proses yang panjang. Untuk itu ia mendorong Pengkab masing-masing Cabor | untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Dengan begitu pembinaan atlet sejak usia dini dapat terus berlanjut.

“Kejurkab Bulu Tangkis tahun 2025 yang digelar PBSI Sidoarjo ini termasuk Kejurkab yang pertama di tahun 2025 ini. Semoga Pengkab Cabor lainnya bisa segera menyelenggarakan kegiatan Kejurkab seperti ini,”harapnya.

Sekretaris Umum PBSI Sidoarjo, M. Nadif, menyampaikan salah satu tujuan digelarnya Kejurkab Bulu Tangkis 2025 kali ini adalah untuk menyiapkan atlet bulu tangkis usia dini diberbagai kompetisi. Ada 18 nomor yang akan dipertandingkan dalam Kejurkab Bulu Tangkis tahun ini. Ia berharap lewat event kejuaran kali ini para atlet Bulu Tangkis Sidoarjo dapat membawa prestasinya di tingkat yang lebih tinggi.

“Kami berharap dari ajang ini lahir atlet bulutangkis berprestasi yang bisa mengharumkan nama Sidoarjo, apalagi tahun 2027 mendatang ada Porprov Jatim,” kata Nadif. (Lisa-Arya)

Wujudkan Kebersamaan Semarak HUT RI ke-80, Kodim 0816/Sidoarjo Gelar Fun Bike dan Olahraga



semarak penuh keceriaan dan rasa kebersamaan begitu terasa di Makodim 0816/Sidoarjo. Minggu pagi (24/8/2025). Ribuan masyarakat tumpah ruah mengikuti acara bertajuk "Semarak Kemerdekaan Fun Bike dan Olahraga Bersama" yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos., serta dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, antara lain H. Subandi, S.H., M.Kn. (Bupati Sidoarjo) beserta Ibu Wakil Bupati Sidoarjo, Ibu Mimik, Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, perwakilan Kapolresta Sidoarjo, Sekda Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, S.KM, M.Kes., serta jajaran dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepala OPD, PJU Polresta, para Danramil, hingga tokoh masyarakat.

Sejak pagi, suasana halaman Makodim dipenuhi antusiasme peserta. Mereka melakukan registrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga mengikuti senam pemanasan bersama. Usai doa pembuka dan pengarahan teknis dari Kapten Inf Hendro Sugiono, S.H. (Pasiops Kodim 0816/Sidoarjo), kegiatan Fun Bike dilepas secara resmi oleh jajaran Forkopimda.

Rute yang ditempuh cukup menantang sekaligus menyenangkan, yakni melalui Jalan Lingkar Timur – Prasung – Maspion II – Banjar Kemantren – Jalan Antartika – Jalan Yos Sudarso – Bluru Kidul, dan kembali finish di Makodim 0816/Sidoarjo. Setibanya di garis

akhir, peserta disambut hangat dengan ramah tamah, hiburan musik band, serta pengundian doorprize yang menambah riuh kegembiraan.

Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. menegaskan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai sebagai perekat persatuan.

"Kegiatan ini bukan hanya sekadar olahraga, melainkan sarana untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat. Semoga semangat HUT ke-80 RI ini menjadi energi untuk terus menjaga persatuan sekaligus membangun Sidoarjo lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos., yang mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme dan partisipasi luar biasa dari masyarakat.

"Fun Bike ini bukan sekadar olahraga bersama, tetapi sebuah wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui kegiatan ini kita tidak hanya menyehatkan jasmani, namun juga menumbuhkan semangat nasionalisme, kebersamaan, serta mempererat persaudaraan. Inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu bersatu, bergotong royong, dan saling menguatkan. Harapan kami, tradisi positif seperti ini dapat terus dilestarikan dan menjadi inspirasi dalam setiap momentum peringatan Hari Kemerdekaan," tutur Dandim dengan penuh semangat.

Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, aman, dan penuh keakraban. Perpaduan antara olahraga, hiburan, dan silaturahmi menjadikan kegiatan ini bukan sekadar perayaan meriah, tetapi juga sebuah pengingat akan nilai gotong royong serta perjuangan para pahlawan bangsa.

Dengan terselenggaranya Fun Bike dan Olahraga Bersama ini, Makodim 0816/Sidoarjo bersama Forkopimda dan masyarakat berhasil menghadirkan perayaan kemerdekaan yang tidak hanya menyatukan langkah, tetapi juga menguatkan rasa cinta tanah air di HUT ke-80 Republik Indonesia.(Tvaz)



LOETR/DUTA

Bupati Subandi saat tinjau RTLH dan bedah warung di Porong-Krembung, Sabtu siang (23/8/25)

Subandi Sidak RTLH dan Bedah Warung di Porong-Krembung

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Subandi kembali melakukan inspeksi mendadak rumah tidak layak huni (RTLH) di Sidoarjo. Kali ini sidak dilakukan di dua desa di Porong dan Krembung, Sidoarjo, Sabtu (23/8/25).

Tahun ini, Pemkab Sidoarjo memasang target melakukan pembenahan terhadap 164 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sidoarjo. Setiap rumah mendapat bantuan perbaikan senilai Rp30 juta.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Subandi kepada Slamet Widodo (73) warga Desa Porong, Kecamatan Porong dan Wahyudi (50) warga Desa Krembung, Kecamatan Krembung Sabtu siang(23/8/25)

Hadir pula dalam acara itu, Dandim 0816, Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo, Bachruni Aryawan, Ketua Baznas Sidoarjo, M. Chasbil Aziz Saldju Sodar, Camat Porong dan Camat Krembung beserta

jajarannya.

"Pemkab Sidoarjo menyalurkan bantuan RTLH tahun ini sebanyak 164 rumah. Kami ingin masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman. Untuk itu kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar program ini terus berjalan optimal," ujar Subandi.

Dikatakan Subandi, program RTLH ini bukan hanya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga dari Dandim 0816 dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Sidoarjo.

"Kalau bantuan RTLH dari Dandim ini sebanyak 158, sedangkan BAZNAS sebanyak 20 hingga 25 rumah per bulan," jelasnya.

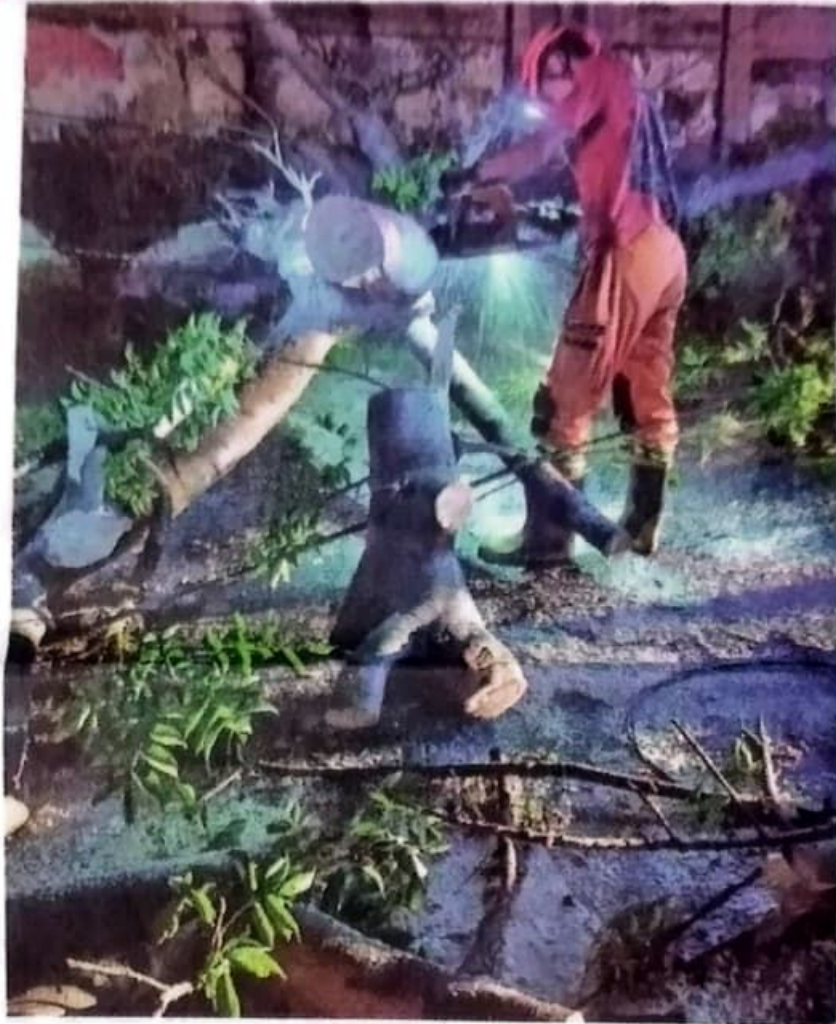
Slamet Widodo, penerima bantuan RTLH di Porong, menyampaikan rasa terima kasihnya. "Alhamdulillah, rumah saya akhirnya bisa diperbaiki. Saya sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pemkab Sidoarjo yang sudah peduli kepada kami," ungkapnya Sabtu sore(23/8/25)

Terpisah hal senada juga disampaikan Isti Wahyudi, warga Krembung. "Terimakasih, matur nuwun bantuannya," ucapnya sambil menangis haru.

Di sela kegiatan RTLH di Porong, Bupati Subandi juga melakukan inspeksi mendadak pada program bedah warung yang sudah berjalan di desa. Ia meninjau Warung Bu Leny yang kini berdiri dan beroperasi dengan baik. Program ini digagas Pemkab Sidoarjo untuk mendorong perekonomian masyarakat desa agar lebih maju dan berdaya.

"Bedah warung ini bukan sekadar membangun fisik, tapi juga membangkitkan ekonomi keluarga. Dengan adanya warung seperti Bu Leny, diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan," tegas Subandi.

"Kami akan terus melanjutkan program-program pro rakyat seperti RTLH dan bedah warung, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh pelosok desa," tambahnya. • Loe



RAPUH: Petugas Damkar Sidoarjo mengevakuasi pohon trembesi yang tumbang di Jalan Lingkar Timur.

Pohon Trembesi Tumbang, Tutup Sebagian Jalan di Lingkar Timur

ARUS lalu lintas di Jalan Lingkar Timur, Desa Klurak, Kecamatan Candi, sempat tersendat pada Sabtu (23/8) malam. Sebuah pohon trembesi setinggi delapan meter tiba-tiba tumbang dan menutup sebagian ruas jalan.

● Ke Halaman 10

Pohon Trembesi Tumbang,...

Beruntung, kejadian tersebut berlangsung saat kondisi jalan relatif sepi sehingga tidak menimbulkan kemacetan panjang maupun korban jiwa.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo, Yoli Wisnu, mengungkapkan bahwa pohon tumbang karena batangnya sudah rapuh akibat dibakar.

"Pohon kondisinya sudah rapuh, akibat dibakar akhirnya tumbang. Tim BPBD Sidoarjo langsung diterjunkan untuk mengevakuasi pohon tersebut," jelasnya, Minggu (24/8).

Setelah menerima laporan, tim

melakukan pemotongan dan evakuasi batang pohon. Proses tersebut memakan waktu sekitar dua jam, dan pada pukul 01.30 arus lalu lintas kembali normal.

Yoli menambahkan, kawasan Lingkar Timur memang dipenuhi pohon-pohon besar. Beberapa di antaranya sudah dirampingkan untuk mencegah hal serupa. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama saat hujan deras disertai angin kencang.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi angin kencang, apalagi cuaca saat ini tidak menentu," pungkasnya. (dik/vga)



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

DIPERCANTIK: Pengerjaan revitalisasi Alun-alun Sidoarjo ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Semua Kabel di Alun-Alun Dipindah ke Bawah Tanah

PROGRES revitalisasi Alun-alun Sidoarjo kini telah mencapai 20–30 persen. Pekerjaan yang dimulai sekitar satu setengah bulan lalu itu ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Hery Santoso, menjelaskan bahwa perkembangan proyek dapat dipantau melalui aplikasi e-kenda (elektronik kendali daerah).

● Ke Halaman 10

Semua Kabel...

“Kalau di e-kenda progresnya sekitar 20 persen. Kami targetkan setiap minggu ada peningkatan 4–5 persen,” ujarnya, Minggu (24/8).

DLHK terus melakukan monitoring dan evaluasi agar pengerjaan sesuai target. Nantinya, Alun-alun Sidoarjo diharapkan menjadi ikon baru Kota Delta.

Menurut Hery, kendala utama

terletak pada pemindahan kabel listrik yang melintas di area alun-alun. Sebab, konsep pembangunan mengharuskan seluruh kabel dipindahkan ke bawah tanah.

“Yang lama memang dari PLN untuk memindahkan kabel. Kontraktor sudah membayar, tapi belum dikerjakan. Kemarin kami sudah berkirim surat ke PLN,” teranginya.

Saat ini, pengerjaan masih difokuskan pada area dasar dan wahana

permainan anak. Paseban Alun-alun juga sudah dibongkar.

Proyek revitalisasi ini dilaksanakan oleh PT Samudra Anugrah Indah Permai dengan nilai kontrak Rp 24,6 miliar. DLHK menargetkan pengerjaan utama rampung pada November 2025.

“Harapannya, November sudah selesai. Jika ada kekurangan kecil, bisa segera diperbaiki sehingga masyarakat dapat segera menikmati Alun-alun baru,” pungkas Hery. (sai/vga)

Plengsengan Sungai Desa Sidokerto Mulai Diperbaiki

BUDURAN-Plengsengan sungai di depan Pasar Sidokerto, Kecamatan Buduran, akhirnya diperbaiki. Kabar ini disambut gembira oleh warga sekitar yang sebelumnya khawatir dengan kondisi sungai yang ambrol.

Sisi sungai yang berbata-san langsung dengan jalan raya itu sebelumnya tampak longsor sebagian. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi mengancam keselamatan pengendara yang melintas, mengingat jalur tersebut merupakan penghubung Buduran-Sukodono sekaligus area padat lalu lintas di depan pasar.

Perbaikan dilakukan dengan pemasangan penahan dan penguatan tepi sungai. Saat ini pengerjaan plengsengan masih berlangsung.

Sutrisno, salah satu warga, mengaku lega melihat plengsengan mulai diperbaiki. "Alhamdulillah sudah diperbaiki, soalnya kalau dibiarkan bisa sangat berbahaya. Jalan ini kan jalur penghubung Buduran ke Sukodono,



DIPERKUAT: Pengerjaan perbaikan plengsengan sungai di depan Pasar Sidokerto, Kecamatan Buduran.

M. SAIFUL HAHMAN/RADAR SIDOARJO

RADAR
SIDOARJO.ID

Plengsengan Sungai...

apalagi depan pasar juga ramai sekali," ujarnya, Minggu (24/8).

Hal senada diungkapkan Bagas Aditya. Menurutnya, langkah pemerintah memperbaiki plengsengan sangat tepat dan mendesak. "Kalau tidak segera

diperbaiki, bisa membahayakan orang lewat," katanya.

Dengan adanya perbaikan tersebut, ia merasa lebih tenang saat beraktivitas. "Harapannya kualitas plengsengan yang baru ini bisa bertahan lama dan kokoh. Semoga pengerjaannya cepat selesai," pungkasnya. (sai/vga)

RADAR
SIDOARJO.ID

Pekarangan Warga di Balongbendo Jadi Arena Perjudian Sabung Ayam



MERESAHKAN: Polisi membakar arena judi sabung ayam di Desa Seketi, Balongbendo, Sidoarjo.

SIDOARJO-Polisi kembali menindak praktik perjudian sabung ayam. Arena sabung ayam di Dusun Polwaga, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, digerebek aparat Polsek Balongbendo pada Sabtu (23/8). Lokasi tersebut kemudian dibongkar dan dibakar lantaran menimbulkan keresahan warga.

Kapolsek Balongbendo, AKP Sugeng Sulistiyono, menjelaskan bahwa penggerebekan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lahan kosong yang kerap digunakan sebagai lokasi sabung ayam. Namun, saat polisi tiba di lokasi, arena sudah bubar.

"Kami langsung merespons laporan warga. Saat anggota datang, kegiatan sudah berhenti, tapi kami tetap melakukan penertiban dengan membakar sarana yang ada agar tidak bisa digunakan lagi," ujarnya, Minggu (24/8).

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua ekor ayam serta sejumlah perlengkapan sabung, termasuk spon pembatas arena. Semua barang bukti dimusnahkan di lokasi.

Menurut AKP Sugeng, pihaknya sudah berulang kali mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik perjudian, termasuk sabung ayam. Namun, laporan terkait aktivitas ilegal itu masih kerap diterima.

"Perjudian dalam bentuk apapun adalah melanggar hukum. Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pengelola arena sabung ayam ini," tegasnya.

Diketahui, arena sabung ayam berada di pekarangan belakang rumah seorang warga bernama Sardi. Polisi memastikan akan menindaklanjuti siapa pihak yang bertanggung jawab mengelola lokasi tersebut.

Sebagai langkah pencegahan, Polsek Balongbendo juga memasang spanduk imbauan larangan judi sabung ayam di sejumlah titik. "Kami berkomitmen menjadikan wilayah hukum Polsek Balongbendo bebas dari segala bentuk perjudian. Untuk itu, kami mengajak masyarakat menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," pungkasnya. (dik/vga)

Serapan Pupuk Subsidi Cukup Baik, Stok Aman hingga Akhir Tahun

KOTA-Realisasi serapan pupuk subsidi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 berjalan cukup baik meski menghadapi sejumlah tantangan. Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) memastikan stok pupuk tetap aman untuk mendukung musim tanam hingga akhir tahun.

Kepala Dispaperta Sidoarjo, Eni Rustianingsih, menjelaskan bahwa alokasi pupuk subsidi dari Pemprov Jawa Timur tahun ini cukup besar, yakni 7.549 ton urea, 4.910 ton NPK, dan 347 ton pupuk organik. Dari jumlah tersebut, serapan hingga Juli menunjukkan tren positif.

"Urea terserap 3.886,8 ton

atau 51,5 persen, NPK 3.188,6 ton atau 64,9 persen, dan pupuk organik 17,8 ton atau 5,1 persen," ujarnya.

Ia optimistis sisa stok pupuk dapat dimanfaatkan maksimal pada musim tanam Oktober–Desember sehingga kebutuhan petani di lapangan tetap terpenuhi. "Serapan tertinggi ada di Kecamatan Wonoayu dengan capaian 89 persen, sementara terendah di Kecamatan Waru hanya 33 persen," ungkapnya.

Meski regulasi penyaluran pupuk dari pemerintah pusat dinilai sudah baik, kendala administratif masih ditemui di lapangan, terutama bagi petani sepuh. Misalnya, KTP

rusak atau buram sehingga sulit terbaca sistem, yang membuat proses penebusan pupuk tertunda. Untuk mengatasi hal itu, Dispaperta berkoordinasi dengan legislatif dan instansi terkait. Bahkan ada anggota dewan yang ikut memfasilitasi pembaruan KTP bagi petani.

Selain kendala administrasi, bencana banjir juga memengaruhi serapan pupuk, terutama di wilayah timur Sidoarjo. "Beberapa desa di Tanggulangin seperti Kedungbanteng, Kalidawir, hingga Jabon kerap terdampak banjir, sehingga berpengaruh terhadap distribusi pupuk," jelas Eni. (sai/vga)



LAHAN HIJAU: Produktivitas lahan pertanian di Sidoarjo tetap terjaga berkat dukungan pupuk subsidi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Targetkan Renovasi 164 RTLH di 2025

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi kembali sidak rumah tidak layak huni (RTLH) di Porong dan Krembung, Sabtu (23/8). Langkah ini gencar dilakukan karena tahun ini, Pemkab Sidoarjo memasang target melakukan pembenahan terhadap 164 RTLH di Kabupaten Sidoarjo. Setiap rumah mendapat bantuan perbaikan senilai Rp 30 juta.

Di Desa Porong, bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Subandi kepada Slamet Widodo (73). Sedangkan di Desa Krembung diserahkan kepada Wahyudi (50). Penyerahan secara simbolis itu didampingi Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Dinas Perkim CKTR Bachruni Aryawan, Ketua Baznas Sidoarjo



Kondisi salah satu rumah sasaran renovasi di Kecamatan Porong.

jo M Chasbil Aziz Saldju Sodar, dan forkopimcam.

“Pemkab Sidoarjo menyalurkan bantuan RTLH tahun ini sebanyak 164 rumah. Kami ingin masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, aman dan nyaman. Untuk itu

kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar program ini terus berjalan optimal,” ujarnya.

Dikatakan, program RTLH bukan hanya berasal dari Pemkab. Namun ada juga yang datang Kodim 0816 dan Baznas

Sidoarjo. “Bantuan RTLH dari Dandim sebanyak 158, sedang Baznas sebanyak 20 hingga 25 rumah per bulan,” jelasnya.

Slamet Widodo, penerima bantuan RTLH di Porong, menyampaikan rasa terima kasihnya. “Alhamdulillah, rumah saya akhirnya bisa diperbaiki. Saya sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pemkab Sidoarjo yang sudah peduli kepada kami,” ungkapnya.

Selain program RTLH, bupati juga menyempatkan sidak program bedah warung. “Bedah warung ini bukan sekadar membangun fisik, tapi juga membangkitkan ekonomi keluarga. Dengan adanya warung seperti Bu Leny, diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan,” urainya. (sud/san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

TP PKK dan Pokja PAUD —



LOETFI/DUTA

Sosialisasi pengelolaan ekonomi keluarga dan usaha berbasis teknologi informasi di era digitalisasi

Sosialisasi Ekonomi Keluarga di Era Digital

SIDOARJO - TP PKK Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Pokja PAUD Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Usaha Berbasis Teknologi Informasi serta Talkshow Bunda PAUD di Pendopo Delta Wibawa, Jumat sore (22/8/25).

Kegiatan ini mengusung tema “Penjaga Awal Masa Depan Bangsa, Mengawal Setiap Langkah Kecil Menuju Generasi Emas Indonesia.”

Hadir sebagai narasumber Talkshow Bunda PAUD, dr. Sriatun Subandi, yang menegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia unggul. Pada usia 0-6 tahun, anak berada dalam masa keemasan (golden age) di mana perkembangan otak dan karakter berlangsung pesat. Pendidikan berkualitas pada masa ini diyakini mampu mengoptimalkan potensi anak, baik kognitif, sosial, emosional, maupun spiritual.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya kader dan tokoh masyarakat, untuk menerapkan konsep ‘PAUD dulu sebelum TK’,” ujarnya.

Dengan ajakan tersebut diharapkan angka partisipasi anak usia dini di lembaga PAUD semakin meningkat, keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar semakin kuat, serta terwujud layanan PAUD yang ramah anak, aman, inklusif, dan didukung lintas sektor.

Sebagai figur penggerak di tingkat daerah, Bunda PAUD bukan hanya simbol, tetapi juga agen perubahan yang menjembatani komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. “Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga menjadi gerakan bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar,” tambahnya.

Selain dr. Sriatun Subandi, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, sebagai narasumber talkshow. ● Loe

78 Disabilitas Berat Menerima Bansos dari Pemprov Jatim

Sidoarjo, Bhirawa

Ada sebanyak 78 keluarga Disabilitas berat di Kabupaten Sidoarjo yang menerima Bansos dari Pemprov Jatim, yang diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (22/8) akhir pekan lalu, di pendopo delta wibawa Sidoarjo. Per tahunnya mereka mendapatkan Rp.3.600.000. Penyalurannya dilakukan setiap Triwulan sekali.

Khusus di Kecamatan Buduran, ada sebanyak 27 orang disabilitas di Kecamatan Buduran, sampai saat ini sudah mendapat Bansos dari Pemkab Sidoarjo maupun dari Pemprov Jatim. Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Buduran, Sriani, mengatakan mereka berasal dari kalangan keluarga tidak mampu.

Bansos yang diterima, digunakan untuk tambahan biaya hidup. Sebab para disabilitas ini perlu penanganan khusus dalam hidup sehari-harinya. "Disabilitas ini perlu perhatian khusus, aktivitas mereka tidak bisa apa-apa, perlu pertolongan dari keluarga atau orang terdekat," kata Sriani, Jumat (22/8) akhir pekan lalu, disela-sela pemberian Bansos dan zakat produktif dari Pemprov Jatim kepada warga di Kabu-



ali kusyanto/bhirawa

Petugas TKSK Buduran, Sriani, mendampingi penyandang disabilitas berat saat berada di pendopo delta wibawa Sidoarjo.

Menurut Sriani, saat ini juga masih ada beberapa Disabilitas berat di Kecamatan Buduran yang saat ini masih dalam proses pengajuan untuk bisa menerima Bansos. Para Disabilitas yang sudah mendapat Bansos maupun yang masih dalam proses pengusulan Bansos, menurut Sriani, diantaranya ada di Desa Sidokepung, Buduran, Dukuh tengah, Sidokerto, Banjar kemantren, Sawohan, Damarsih dan Desa Prasung.

Keluarga para penyandang Dis-

abilitas yang saat ini sudah mendapat perhatian dari Pemerintah ini, menurut Sriani, awalnya tertutup dengan kondisi anak mereka. Sebab jelas saja dianggap sebagai aib, sehingga ditutup-tutupi. Petugas menurut Sriani, berhasil mengedukasi keluarga, sehingga kondisi penyandang Disabilitas di keluarga berhasil didata, supaya mendapat perhatian dari Pemerintah. "Kami sampaikan kepada keluarga, kalau para penyandang disabilitas ini sebagai anak emas titipan

dari Tuhan," kata Sriani.

Dari para penyandang Disabilitas yang ia data di Kecamatan Buduran, sampai saat ini yang paling tua usianya adalah 21 tahun. Menurutnya para penyandang cacat berat ini, tidak hanya ada di Kecamatan Buduran saja. Tetapi juga pada 17 kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Informasi yang ia dapatkan, jumlah penyandang disabilitas berat ini untuk sementara paling banyak ada di wilayah Kecamatan Waru. [kus.ca]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Sidoarjo

KAMTIBMAS



SATPOL PP SIDOARJO

DITINDAK: Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo Novianto Koesno (kiri) menginterogasi pemandu lagu tanpa identitas dan pemilik kafe yang dirazia Sabtu (23/8) malam.

Razia Kafe, Satpol PP Temukan Pemandu Lagu dan Miras Ilegal

SIDOARJO - Satpol PP Sidoarjo merazia sebuah kafe di Desa Bringinbendo, Taman, Sabtu (23/8) malam. Hasilnya ditemukan perempuan pemandu lagu tanpa dokumen identitas dan ratusan botol miras ilegal.

Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo Novianto Koesno menjelaskan, razia itu digelar pukul 21.00. "Targetnya kafe yang diduga melanggar aturan ketertiban umum," ujarnya kemarin (24/8).

Dalam razia itu, pihaknya mendapat sejumlah temuan. Di antaranya perempuan pemandu lagu tanpa identitas. Juga diamankan 21 kardus miras jenis arak. (edi/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SOLUSI JALANAN GELAP

- Jalan gelap seperti di Buduran, Porong, dan Trosobo dikeluhkan pengendara karena rawan kecelakaan.
- Pemkab Sidoarjo mengalokasikan Rp 10,8 miliar untuk menambah 400 titik PJU.
- Fokus pemasangan PJU lebih mengutamakan fungsi penerangan dibanding estetika.
- Dishub menargetkan seluruh pemasangan rampung akhir tahun ini.

SUMBER: DISHUB SIDOARJO



Kami ingin jalan-jalan di Sidoarjo semakin terang, sehingga aktivitas warga di malam hari lebih aman dan nyaman."

**BENNY
AIRLANGGA
YOGASWARA**
Kepala Dishub
Sidoarjo



ANGGER BOHDAN/JAWA POS

DIKELUHKAN WARGA: PJU di Jalan Buduran kemarin (24/8). Lampu di jalan itu termasuk salah satu yang sering padam.

Pemkab Gelontorkan Rp 10,8 Miliar untuk Tambah 400 PJU

Paling Banyak di Kecamatan Taman

SIDOARJO - Sejumlah jalan di Sidoarjo masih banyak dikeluhkan gelap. Antara lain di Kecamatan Buduran, Porong, Taman dan lainnya. Solusinya, Pemkab Sidoarjo menggelontor anggaran Rp 10,8 miliar untuk menambahkan penerangan jalan umum (PJU) tahun ini. Total ada 400 lokasi PJU baru bakal dipasang di empat kawedanan.

Pengendara Terganggu Jalan Gelap

Salah satu titik yang sering padam yaitu di Jalan Raya Buduran, Jalan Raya Porong, dan Jalan Raya Trosobo. Kondisi tersebut dikeluhkan pengendara. "Kalau gelap agak bahaya, seperti di Jalan Raya Buduran

ini sering kali mati lampunya," ujar Oktario salah satu warga. Pria 29 tahun mengungkapkan bahwa kondisi lokasi yang gelap sering mengganggu pengendara.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara mengatakan, fokus utama penambahan PJU itu untuk keamanan dan kenyamanan. "Kami prioritaskan pada fungsi penerangan. Tidak seperti di alun-alun atau kawasan pusat kota yang ditata lebih estetik," katanya.

Tekan Risiko Kecelakaan

Selain untuk kenyamanan saat malam hari, penambahan itu juga untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan atau tindak kriminalitas lalu lintas.

Benny menyebut fokus utama pemasangan ada di area

eks kawedanan Taman. Karena itu, dari anggaran total Rp 10,8 miliar, alokasi anggaran paling besar di eks kawedanan Taman yaitu Rp 4,3 miliar. Sementara eks kawedanan Porong dan Krian masing-masing memperoleh Rp 2,6 miliar. Untuk eks kawedanan Sidoarjo, dana yang digelontorkan mencapai Rp 1,3 miliar. "Pembagian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan penerangan di setiap kawasan," katanya.

Akhir Tahun Tuntas

Benny mengatakan rencana pemasangan PJU sudah memasuki tahap lelang. Dishub menargetkan proses tersebut berjalan cepat agar pengerjaan bisa segera dimulai. Sehingga akhir tahun tuntas. "Kami ingin jalan-jalan di Sidoarjo makin terang, sehingga aktivitas warga di malam hari lebih aman dan nyaman," paparnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kabel Menggantung di Alun-Alun Akan Dipindah ke Bawah Tanah

SIDOARJO - Kabel yang menggantung di atas area alun-alun akan dirapikan. Kabel itu akan dipindah ke bawah tanah. Namun, revitalisasi Alun-alun Sidoarjo sudah berjalan 1,5 bulan, kabel tak kunjung dipindahkan.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Hery Santoso mengungkapkan, proses pemindahan

kabel PLN hingga kini belum terealisasi. "Kontraktor sudah membayar biaya pemindahan, tapi dari PLN belum mengerjakan," ujarnya kemarin (24/8).

Hery mengatakan, seluruh kabel dipindahkan ke bawah tanah agar area alun-alun lebih rapi. "Dari dinas juga sudah melayangkan surat resmi agar segera ditindaklanjuti. Kami tunggu saja, kalau tidak segera, kami surati lagi nanti," katanya. Bukan hanya PLN saja, kabel fiber optik

dari sejumlah provider wifi juga bakal dipindah ke bawah tanah. DLHK Sidoarjo menargetkan dalam sebulan ini kabel bisa dipindahkan.

Hery mengungkapkan proses revitalisasi masih berjalan. DLHK menargetkan proyek 24,6 miliar itu rampung pada November 2025. "Kami harap kendala pemindahan kabel segera selesai, sehingga pekerjaan tidak molor. Target kami, November sudah rampung," paparnya. (eza/uzi)



RUWET: Tumpukan kabel di atas area Alun-alun Sidoarjo, kemarin (24/8). Kabel akan dipindahkan ke bawah tanah agar tidak mengganggu pemandangan.

Jawa Pos

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • SENIN 25 AGUSTUS TAHUN 2025 | HALAMAN 18



LOMPAK: Peserta dari RW 8 Desa Kalisampurno tampil dengan tema Kerajaan Sriwijaya saat mengikuti lomba Karnaval Kalisampurno di Jalan H Umar, Tanggulangin, kemarin (24/8). Karnaval itu sekaligus ajang edukasi sejarah.

FOTO FOTO: ANGKEY BONGGAM/JAWA POS

Karnaval Kalisampurno Tampilkan Teatrikal Kerajaan Nusantara

SIDOARJO – Setelah lima tahun vakum, Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, kembali menggelar karnaval kemerdekaan kemarin (24/8). Ratusan warga tumpahlele di depan SMPN 1 Tanggulangin dengan kostum megah ala kerajaan nusantara.

Sebanyak sembilan RW ikut ambil bagian. Masing-masing menampilkan teatrikal sesuai undian kerajaan yang diperoleh, mulai Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Kediri, Demak, Blambangan, Jenggolo, Kahuripan, hingga

Pajajaran.

"Warga menyiapkan pertunjukan sebulan penuh. Ada yang membawakan drama sejarah, ada pula teatrikal sesuai cerita kerajaan," ujar Kepala Desa Kalisampurno Dedi Purwandoyo.

Sebelum pawai keliling desa, tiap RW terlebih dulu unjuk penampilan di depan panggung dengan jeda 10-15 menit. Antusiasme warga terlihat sejak siang. Ratusan penonton sudah memadati rute untuk menyaksikan parade prajurit, raja, hingga permaisuri.



PEMBUKA: Kadus Kalisampurno Dedi Purwandoyo (kiri) menyampaikan arahan sebelum lomba karnaval Kalisampurno kemarin (24/8). Dedi mengenakan kostum ala raja di Nusantara.

Menurut Dedi, karnaval tidak sekadar hiburan, tetapi juga sarana edukasi sejarah bagi masyarakat. Penampilan teatrikal itu sekaligus dilombakan. Juri akan menilai

keaktivitas, kekompakan, serta penggambaran sejarah. "Pengumuman juara akan disampaikan 26 Agustus bertepatan dengan resepsi penutupan," imbuhnya. (eza/uzi)

Jawa Pos

✓

FASUM



ANGGER BONDAN/ JAWA POS

PROTES: Warga Mutiara Regency memasang spanduk berisikan penolakan tembok perumahan dibongkar untuk akses jalan perumahan lain, kemarin (24/8).

Warga Mutiara Regency Tolak Pembongkaran Tembok untuk Akses Perumahan Lain

SIDOARJO - Warga Perumahan Mutiara Regency menolak tembok pembatas di lingkungan mereka dibongkar untuk akses ke perumahan lain. Meskipun, fasum tersebut sudah diserahkan ke Pemkab Sidoarjo.

Choirul Chodirin, tokoh warga, menyatakan, penolakan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. "Tembok itu sudah dipasang pengembang sejak awal perumahan berdiri," ungkapinya kemarin (24/7).

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono secara terpisah menyatakan, situasi itu adalah dinamika pembangunan. Jalan Mutiara Regency di satu sisi sudah diserahkan ke Pemkab. Namun, warga tidak mau dijadikan akses ke perumahan lain. "Pemkab tentunya harus bijak mengambil keputusan," katanya. (edi/uzi)

Jawa Pos